



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.9, 2008

AGREEMENT. Pengesahan. Pembebasan Visa.  
Indonesia-Rusia.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PEMBEBASAN  
VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK  
DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE  
RUSSIAN FEDERATION ON VISA EXEMPTION FOR SHORT-TERM  
VISITS OF THE HOLDERS DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Moskow, Rusia, pada tanggal 1 Desember 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Peretujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Visa Exemption for Short-Term Visits of the Holders Diplomatic and Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia;

- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON VISA EXEMPTION FOR SHORT-TERM VISITS OF THE HOLDERS DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Visa Exemption for Short-Term Visits of the Holders Diplomatic and Service Passports*) yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2006 di Moskow, Rusia yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 2**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2008  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA**

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA  
TENTANG  
PEMBEBASAN VISA KUNJUNGAN SINGKAT  
BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia selanjutnya disebut sebagai Para Pihak,

DALAM RANGKA untuk meningkatkan hubungan bilateral antara kedua Negara dan memfasilitasi perjalanan warga negara kedua pihak,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

**Pasal 1**

1. Pemegang paspor diplomatik atau dinas dari Negara salah satu Pihak dengan masa berlaku minimal 6 bulan sebelum memasuki wilayah negara Pihak lain dibebaskan dari persyaratan visa masuk, transit, tinggal untuk masa 14 hari terhitung tanggal berlakunya bebas visa masuk dan keluar di wilayah Negara Pihak lain.
2. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang satu kali untuk waktu tidak lebih dari 90 hari secara keseluruhan berdasarkan permintaan dari perwakilan diplomatik atau kantor konsuler dari Negara pengirim.

**Pasal 2**

Warga negara dari masing-masing Pihak yang berhak atas bebas visa berdasarkan ayat 1 Pasal 1 Persetujuan ini dapat memasuki, transit dan keluar wilayah Pihak lain melalui pelabuhan-pelabuhan yang terbuka bagi penumpang internasional, dengan mematuhi hukum dan perundang-undangan Negara Pihak lain yang bersangkutan mengenai prosedur masuk, perjalanan dan tinggal bagi orang asing.

**Pasal 3**

Para pihak akan menginformasikan satu sama lain secepatnya tentang perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan di masing-masing negaranya mengenai prosedur masuk, perjalanan dan tinggal bagi orang asing.



#### **Pasal 4**

Warga Negara pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah dari Negara satu Pihak wajib mematuhi hukum dan peraturan perundangan dari Negara tuan rumah selama masa tinggal di wilayah Negara Pihak lain.

#### **Pasal 5**

Tidak ada ketentuan dalam perjanjian ini yang membatasi hak pihak-pihak berwenang di negara Para Pihak untuk menolak masuk wilayahnya atau tinggal di warga negara dari negara pihak lain yang juga memiliki bebas visa masuk berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan perundang-undangan negara-negara Para Pihak.

#### **Pasal 6**

Penerapan Persetujuan ini dapat di ditunda seluruhnya ataupun sebagian oleh Pihak lain yang didasarkan atas keamanan nasional, ketertiban umum atau alasan-alasan yang berhubungan dengan kesehatan publik.

Para Pihak dalam waktu tidak lebih dari 72 jam sebelum menerapkan atau mencabut pembatasan-pembatasan tersebut akan saling memberitahukan melalui saluran diplomatik.

#### **Pasal 7**

1. Dalam waktu 30 hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, Para Pihak akan saling menyampaikan melalui saluran diplomatik, contoh paspor diplomatik dan dinas serta informasi mengenai prosedur penggunaannya.
2. Tidak lebih dari 30 hari sebelum secara resmi paspor Diplomatik dan Dinas baru serta modifikasi yang masih berlaku, Para Pihak akan saling memberitahukan mengenai langkah-langkah yang ditempuh melalui saluran diplomatik.

#### **Pasal 8**

Dalam hal warga negara dari Negara satu Pihak kehilangan atau rusak paspor Diplomatik atau Dinasnya di wilayah Negara Pihak lainnya, yang bersangkutan harus secepatnya memberitahu otoritas berwenang dari Negara penerima melalui misi diplomatik atau kantor konsulat Negara yang bersangkutan. Perwakilan diplomatik atau kantor konsulat terkait akan menerbitkan paspor diplomatik dan dinas baru atau dokumen perjalanan sementara agar yang



bersangkutan dapat kembali ke negaranya, dan memberitahukan otoritas dari Negara penerima.

**Pasal 9**

1. Persetujuan ini akan berlaku 30 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan nasional bagi berlakunya persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini akan tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis selama jangka waktu 5 tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak dalam waktu 6 bulan sebelum habisnya jangka waktu dengan memberitahu Pihak lain melalui saluran diplomatik secara tertulis mengenai rencana pengakhiran Persetujuan ini.
3. Perbedaan atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan ketentuan dari Persetujuan ini, diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
4. Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi, apabila dipandang perlu, melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh kedua Pihak. Amandemen atau revisi tersebut akan berlaku berdasarkan ketentuan ayat 1 Pasal ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Moskow pada hari pertama bulan Desember, 2006, dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**



**UNTUK PEMERINTAH  
FEDERASI RUSIA**





## СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством Республики Индонезии и  
Правительством Российской Федерации об отказе от визовых  
формальностей при осуществлении владельцами дипломатических и  
служебных паспортов краткосрочных поездок

Правительство Республики Индонезии и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь стремлением развивать дружеские отношения между двумя государствами и создавать наиболее благоприятные условия для осуществления взаимных поездок граждан,

**СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:**

### Статья 1

1. Владельцы действительных дипломатических или служебных паспортов государства одной Стороны при условии, что срок действия их паспорта истекает не позднее, чем за 6 месяцев до даты предполагаемого въезда на территорию государства другой Стороны, освобождаются от необходимости получения визы для въезда, следования транзитом, пребывания (сроком до 14 дней с даты их безвизового въезда) на территории государства другой Стороны и выезда с нее.

2. Срок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть однократно продлен на срок, не превышающий в совокупности 90 дней, по просьбе дипломатического представительства или консульского учреждения направляющего государства.

### Статья 2

Граждане государства одной Стороны, пользующиеся режимом безвизового въезда согласно пункту 1 статьи 1 настоящего Соглашения, могут въезжать, следовать транзитом и выезжать с территории государства другой Стороны через пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, при условии соблюдения ими законов и правил государства этой другой Стороны, регулирующих процедуры въезда, передвижения и пребывания иностранных граждан.

### Статья 3

Стороны незамедлительно уведомляют друг друга о любых изменениях в законах и правилах своих государств, регулирующих, процедуры въезда, передвижения и пребывания иностранных граждан.

### Статья 4

Граждане государства одной Стороны, являющиеся владельцами действительных дипломатических и служебных паспортов, в период пребывания на территории государства другой Стороны обязаны уважать законы и правила государства этой другой Стороны.

### Статья 5

Ни одно из положений настоящего Соглашения не ограничивает право компетентных органов государства одной Стороны отказать во въезде на территорию этого государства или в пребывании на ней любому гражданину государства другой стороны, пользующемуся правом безвизового въезда, предусмотренного настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством государств Сторон.



### Статья 6

Применение настоящего Соглашения может быть частично или полностью приостановлено любой из Сторон по соображениям государственной безопасности, общественного порядка или здоровья населения.

Стороны не менее чем за 72 часа до принятия или отмены таких ограничительных мер информируют друг друга об этом по дипломатическим каналам.

### Статья 7

1. В течение 30 дней с даты подписания настоящего Соглашения Стороны обмениваются по дипломатическим каналам образцами действительных дипломатических и служебных паспортов, а также информацией о порядке их использования.

2. Стороны не позднее 30 дней до официального введения новых дипломатических или служебных паспортов, а также до изменения существующих паспортов информируют друг друга об этом по дипломатическим каналам.

### Статья 8

Граждане государства одной Стороны при утрате или повреждении своих дипломатических или служебных паспортов на территории государства другой Стороны незамедлительно информируют об этом компетентные органы принимающего государства через дипломатическое представительство или консульское учреждение государства своего гражданства. Это дипломатическое представительство или консульское учреждение выдает таким лицам новые дипломатические или служебные паспорта либо, временные документы, удостоверяющие личность и дающие право на возвращение в государство гражданства, и уведомляет об этом компетентные органы принимающего государства.



### Статья 9

1. Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. Настоящее Соглашение заключается сроком на пять 5 лет. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не менее чем за 6 месяцев до предполагаемой даты прекращения его действия не уведомит другую Сторону в письменной форме по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие.

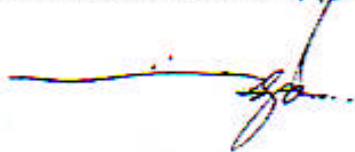
3. Любые разногласия или споры по вопросам, касающимся применения настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций или переговоров между Сторонами.

4. По взаимному письменному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения. Такие изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, надлежащим образом уполномоченные соответствующими Сторонами, подписали настоящее Соглашение.

Совершено в Москве 1 декабря 2006 года в двух экземплярах, каждый на индонезийском, русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае расхождений в толковании положений настоящего Соглашения используется текст на английском языке.

**ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ**



**ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**





**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION  
ON  
VISA EXEMPTION FOR SHORT-TERM VISITS OF  
THE HOLDERS DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation hereinafter referred to as "the Parties",

With a view to promoting friendly relations between the two countries and facilitating the travel of their nationals,

Have agreed as follows:

**Article 1**

1. Holders of diplomatic or official passports of the State of one Party with the validity of less than 6 months prior to the date of the expected entry into the territory of the State of the other Party shall not be required to obtain visa to enter, transit through, stay for a period of 14 days from the date of their visa free entry in the territory of the State of the other Party and exit from it.
2. Such period may be extended once for the period not exceeding 90 days in whole upon request of the diplomatic mission or a consular office of the sending State.

**Article 2**

Nationals of the State of one Party entitled to visa exemption under the provision of paragraph 1 of Article 1 of this Agreement may enter into, transit through and leave the territory of the State of the other Party at any points open for international passenger traffic, provided that they respect the laws and regulations of the State of the respective other Party, governing the procedures of entry, travel and stay of foreigners.

**Article 3**

The Parties shall inform each other immediately about any changes in the laws and regulations of their respective States governing the procedures of entry, movement and stay of foreigners.



**Article 4**

National of the State of one Party holding valid diplomatic and service passports shall respect laws and regulations of the host State through the duration of their stay in the territory of the State of the respective other Party.

**Article 5**

No provision of this Agreement shall restrict the right of competent authorities of the State of either Party to refuse entry to the territory of its State or stay therein to any national of the State of the other Party entitled to visa exemption under this Agreement according to the legislation of the States of the Parties.

**Article 6**

The Application of this Agreement may be provisionally suspended in whole or in part by either Party on the grounds of national security, public order or public health reasons.

The Parties shall not less than 72 hours prior to the imposing or revocation of such restrictions notify each other of such measures through diplomatic channels.

**Article 7**

1. Within 30 days after signing of this Agreement the Parties shall convey to each other through diplomatic channels the specimens of their valid diplomatic and service passports as well as the information on the procedure of their use.
2. Not less than 30 days prior to the official introduction of new diplomatic or service passports as well as modifications of existing ones, the Parties shall inform each other about such measures through diplomatic channels.

**Article 8**

In case if nationals of the State of one Party lose or damage their diplomatic or service passports in the territory of the State of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving State through diplomatic mission or consular office of the State of their nationality. The diplomatic mission or consular office concerned shall issue a new diplomatic or service passport or a temporary identification document to provide the return



the aforementioned national to the State of his/her nationality, and inform the competent authorities of the receiving State.

#### **Article 9**

1. This Agreement shall enter into force 30 days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties have informed each other through diplomatic channels that all requirements for entry into force of the Agreement as stipulated by their respective national legislation have been met.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 years and shall be automatically extended thereafter for successive 5-year periods, unless one of the Parties at least 6 months prior to the expiry of the relevant period notifies the other Party through diplomatic channels in writing of its intention to terminate this Agreement.
3. Any difference or dispute arising out of the implementation of the provisions of the Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties.
4. This Agreement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual written consent by the Parties. Such amendments shall enter into force according to the provisions of paragraph 1 of this Article.

In witness thereof, the undersigned being duly authorized by respective Parties, have signed this present Agreement.

Done at Moscow on this 1<sup>st</sup> day of December 2006 in two originals, each in the Indonesian, Russian and English languages, all text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall be used.

**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA**



**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE RUSSIAN FEDERATION**

